

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sistem otonomi daerah, terdapat 3 (tiga) prinsip yang dijelaskan UU No.32 Tahun 2004 yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. *Desentralisasi* adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. *Dekonsentrasi* adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan *tugas pembantuan* adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari kinerja daerah dalam mengelola keuangannya. Suatu daerah mampu berotonomi dilihat dari kemampuan keuangan daerah. Artinya, harus mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Kemandirian suatu daerah sangat diperlukan karena suatu daerah yang mandiri berarti tingkat ketergantungannya kepada pemerintah pusat sangat rendah, bahkan tidak

tergantung sama sekali.

Ketertanggung terhadap pemerintah pusat harus seminimal mungkin sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. PAD juga merupakan salah satu tolok ukur dari keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah yang besar juga menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat dalam menanggung biaya pembangunan dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah yang besar dapat memberikan kebebasan besar bagi Pemerintah Daerah untuk membuat inisiatif dan rencana yang dibutuhkan oleh daerah. (A. Kuswandi, 2009).

Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004, keuangan daerah adalah kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan daerah. Undang-undang No.33 Tahun 2004 pasal 1 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah.

Pendapatan daerah juga merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah didalam memperoleh pendapatan daerah. Oleh sebab itu, PAD merupakan faktor penting dalam otonomi daerah. Dengan menggali berbagai potensi pada suatu daerah diharapkan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan pembangunan daerahnya.

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat. Oleh karna itu, terkait fungsi utama pemerintah daerah sebagai penyedia layanan kepada masyarakat, untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dalam hal menggali berbagai potensi daerah yang ada.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga diharapkan dapat meningkatkan PAD dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan suatu perencanaan yang tepat dengan memperhatikan potensi yang dimilikinya terutama dalam mengidentifikasi keterkaitan antara PAD, PDRB, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riil
Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat 2006-2010
(Rupiah)

Tahun	PAD Riil	Pertumbuhan (%)
2006	9.152.173.213,45	-----
2007	12.737.508.984,63	39,17
2008	15.153.137.432,67	18,91
2009	18.115.662.442,34	19,54
2010	20.616.170.859,24	13,80

Sumber : BPS Kab. Kapuas Hulu, diolah.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga diharapkan dapat meningkatkan PAD dari tahun ke tahun. Peningkatan PAD Kabupaten Kapuas Hulu dipengaruhi oleh pajak dan retribusi daerah. Tabel 1.1 menunjukkan PAD riil dan pertumbuhannya tahun anggaran 2006-2010. PAD riil pada tahun 2006 sebesar Rp 9,1 milyar. PAD riil tahun 2007 sebesar 12,7 milyar dengan pertumbuhan sebesar 39,17%. Tahun 2008 PAD riil sebesar 15,1 milyar dengan pertumbuhan sebesar 9,33%. Tahun 2009 sebesar 18,1 milyar dengan pertumbuhan sebesar 7,88%. Dan tahun 2010 PAD riil sebesar 20,6 milyar dengan pertumbuhan sebesar 6,28%.

Pertumbuhan perekonomian suatu daerah dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di daerah tersebut. Pada umumnya perkembangan perekonomian suatu wilayah dapat diketahui melalui perkembangan PDRB dan sumbangan setiap sektor terhadap nilai PDRB tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi

suatu negara/wilayah/daerah. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Perkembangan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB.

Tabel 1.2
PDRB Riil atas Dasar Harga Kostan 2000
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2006-2010
(Juta Rupiah)

Tahun	PDRB riil	Pertumbuhan (%)
2006	1.019.095,02	-----
2007	1.053.983,57	1,01
2008	1.091.423,85	9,48
2009	1.131.792,07	9,50
2010	1.182.011,43	9,22

Sumber : Kabupaten Kapuas Hulu dalam angka 2011.

Tabel 1.2 menunjukkan nilai PDRB riil atas dasar harga konstan 2000 Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2006 sampai 2010. Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa nilai PDRB riil Kapuas Hulu semakin meningkat dengan pertumbuhan yang semakin meningkat pula dari tahun ke tahun. Tahun 2007 pertumbuhan PDRB riil sebesar 1,01%, kemudian meningkat pada tahun 2008 sebesar 9,48%. Tahun 2009 meningkat lagi menjadi 9,50% dan tahun 2010 sebesar 9,22%.

Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan produk domestik regional bruto perkapita (PDRB perkapita) (Zaris, 1987: 82). Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah

tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah. Hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan secara fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya.

Pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan akan lebih sulit dilakukan pemerintah daerah apabila tanpa adanya dukungan dari pihak swasta. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang mendukung penanaman modal yang saling menguntungkan baik bagi pemerintah daerah, pihak swasta maupun terhadap masyarakat daerah. Tumbuhnya iklim investasi yang sehat dan kompetitif diharapkan akan memacu perkembangan investasi yang saling menguntungkan dalam pembangunan daerah.

Tabel 1.3
Investasi Riil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2006-2010
(Juta Rupiah)

Tahun	Investasi	Pertumbuhan (%)
2006	126.374,27	-
2007	127.322,00	
2008	197.446,00	1,21
2009	536.674,57	1,37
2010	1.424.480,03	4,94

Sumber : BPS Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel 1.3 menunjukkan investasi riil Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2006 sampai 2010. Dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa investasi riil Kapuas Hulu terus meningkat. Tahun 2007 investasi riil sebesar Rp127.322,00. Tahun 2008 investasi riil sebesar Rp 197.446,00 dengan pertumbuhan sebesar 1,21%. Meningkat pada tahun 2009 menjadi Rp 536.674,57 dengan pertumbuhan sebesar 1,37%. dan meningkat pesat pada tahun 2010 sebesar Rp 1.424.480,03 dengan pertumbuhan sebesar 4,94%.

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari tingkat investasi suatu daerah. Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar. Secara teoritis, daerah dengan peringkat daya tarik investasi yang tinggi akan memiliki jumlah PAD yang tinggi pula, karena investasi di suatu daerah dengan sendirinya akan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah tersebut untuk kemudian meningkatkan jumlah pendapatan daerah dari pajak.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk melihat apakah daerah telah siap secara finansial untuk menyongsong otonomi daerah, antara lain adalah dengan melihat apakah sumber-sumber penerimaan APBDnya mampu menutup anggaran belanja daerah yang bersangkutan. Di samping itu anggaran belanja pembangunan yang dialokasikan pada program proyek yang langsung menyentuh sektor ekonomi produktif masyarakat akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat (Uppal,1986).

Tabel 1.4
Pengeluaran Riil Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2006-2010
(Ribu Rupiah)

Tahun	Pengeluaran Riil Pemerintah	Pertumbuhan (%)
2006	513.081.886,00	-----
2007	527.717.074,00	2,00
2008	543.665.305,00	1,95
2009	760.671.286,00	2,57
2010	713.907.756,00	1,23

Sumber : BPS Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel 1.4 menunjukkan realisasi pengeluaran pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2006 sampai 2005. Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa pengeluaran pemerintah riil Kabupaten Kapuas Hulu meningkat selama lima tahun terakhir ini. Tahun 2006 pengeluaran pemerintah sebesar Rp 513.081.886,00. Tahun 2007 sebesar Rp 527.717.074,00 dengan pertumbuhan sebesar 2,00%. Tahun 2008 meningkat menjadi Rp 543.665.305,00 dengan pertumbuhan sebesar 1,95%. Kemudian meningkat lagi tahun 2009 sebesar Rp 760.671.286,00 dengan pertumbuhan sebesar 2,57% dan tahun 2010 sebesar Rp 713.907.756,00 dengan pertumbuhan sebesar 1,23%.

Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang

penting. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat.

Dengan berjalannya otonomi daerah, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan potensi daerahnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerahnya. Dengan meningkatnya pendapatan daerah, secara otomatis pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga meningkat. Melalui otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan dapat menggali potensi-potensi daerah yang ada. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sangat berperan penting dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dalam hal menggali potensi daerahnya. Sehingga pendapatan daerah yang meningkat dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Sesuai dengan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan topik menggali potensi daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini berjudul **“Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 1995-2010”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan diatas penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui:

1. Bagaimana pengaruh PDRB Kabupaten Kapuas Hulu terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

2. Bagaimana pengaruh investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
4. Bagaimana pengaruh PDRB, Investasi, dan Pengeluaran pemerintah secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB Kabupaten Kapuas Hulu terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh PDRB, Investasi, dan Pengeluaran pemerintah secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan referensi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang.

2. Bagi Penulis

Sebagai wujud penerapan dan pengamalan ilmu yang telah didapatkan pada masa kuliah yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada program studi Ilmu Ekonomi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

1.5 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Diduga variabel investasi berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Diduga variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Diduga variabel PDRB, Investasi, dan Pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini akan di bagi menjadi lima (5) bab,

yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini menjelaskan tentang teori-teori mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah. Dalam bab ini juga disajikan studi terkait/penelitian terdahulu yang diacu dalam penelitian untuk skripsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan mengenai data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kapuas Hulu, data Investasi Kabupaten Kapuas Hulu, dan data Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, serta model dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pembahasan dari analisis data PAD, data PDRB, data Investasi, data Pengeluaran Pemerintah, dan hasil perhitungan dari data PAD,

data PDRB, data Investasi, dan data Pengeluaran Pemerintah yang sudah diolah terlebih dahulu berdasarkan hipotesis penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil perhitungan analisis, dan saran-saran yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

